



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2008

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM

DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah telah melakukan perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009;
- b. bahwa perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 pada tanggal 29 Oktober 2008;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2009.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum terdiri dari:
  - a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi;
  - b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten dan Kota.

(2) Jumlah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun 2009 ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- (3) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
  - b. Untuk Daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

## Pasal 2

- (1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dana Alokasi Umum suatu Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.

(3) Celah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Celah fiskal Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- (4) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
- (6) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh Daerah Provinsi atau Dana Alokasi Umum seluruh Kabupaten dan Kota.
- (7) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke-13, dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 3

- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar.
- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
- (4) Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima Dana Alokasi Umum.

### Pasal 4

Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk 26 (dua puluh enam) daerah pemekaran dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai sesuai dengan ketersediaan data.

### Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6 ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 74 TAHUN 2008  
TANGGAL 24 DESEMBER 2008

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM  
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2009

NO.	DAERAH	JUMLAH
<b>I.</b>	<b>Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam</b>	509.686.227.000
1.	Kab. Aceh Barat	315.643.644.000
2.	Kab. Aceh Besar	398.132.666.000
3.	Kab. Aceh Selatan	326.494.771.000
4.	Kab. Aceh Singkil	209.179.088.000
5.	Kab. Aceh Tengah	317.747.109.000
6.	Kab. Aceh Tenggara	284.713.240.000
7.	Kab. Aceh Timur	358.650.058.000
8.	Kab. Aceh Utara	226.980.563.000
9.	Kab. Bireun	391.960.831.000
10.	Kab. Pidie	417.373.557.000
11.	Kab. Simeulue	209.826.056.000
12.	Kota Banda Aceh	313.120.380.000
13.	Kota Sabang	182.453.311.000
14.	Kota Langsa	228.871.823.000
15.	Kota Lhokseumawe	248.522.186.000
16.	Kab. Nagan Raya	324.208.182.000
17.	Kab. Aceh Jaya	218.516.752.000

18. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
18.	Kab. Aceh Barat Daya	231.871.423.000
19.	Kab. Gayo Lues	252.882.474.000
20.	Kab. Aceh Tamiang	259.596.087.000
21.	Kab. Bener Meriah	227.314.690.000
22.	Kota Subulussalam	167.097.899.000
23.	Kab. Pidie Jaya	212.543.351.000
<b>II. Provinsi Sumatera Utara</b>		
1.	Kab. Asahan	446.552.354.000
2.	Kab. Dairi	327.828.550.000
3.	Kab. Deli Serdang	784.016.979.000
4.	Kab. Tanah Karo	393.389.952.000
5.	Kab. Labuhan Batu	247.304.281.000
6.	Kab. Langkat	597.473.050.000
7.	Kab. Mandailing Natal	385.220.708.000
8.	Kab. Nias	400.243.375.000
9.	Kab. Simalungun	634.428.061.000
10.	Kab. Tapanuli Selatan	274.923.575.000
11.	Kab. Tapanuli Tengah	292.582.207.000
12.	Kab. Tapanuli Utara	360.540.079.000
13.	Kab. Toba Samosir	279.893.493.000
14.	Kota Binjai	283.636.215.000
15.	Kota Medan	855.629.207.000

16. Kota ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
16.	Kota Pematang Siantar	307.523.437.000
17.	Kota Sibolga	211.206.693.000
18.	Kota Tanjung Balai	227.872.150.000
19.	Kota Tebing Tinggi	221.405.119.000
20.	Kota Padang Sidempuan	256.538.765.000
21.	Kab. Pakpak Bharat	162.406.506.000
22.	Kab. Nias Selatan	267.981.010.000
23.	Kab. Humbang Hasundutan	260.055.481.000
24.	Kab. Serdang Bedagai	396.352.183.000
25.	Kab. Samosir	234.939.346.000
26.	Kab. Batu Bara	315.316.161.000
27.	Kab. Labuhan Batu Utara	171.793.832.000
28.	Kab. Labuhan Batu Selatan	158.675.178.000
29.	Kab. Padang Lawas Utara	150.577.523.000
30.	Kab. Padang Lawas	139.977.969.000
<b>III.</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>648.943.012.000</b>
1.	Kab. Limapuluh Kota	391.553.317.000
2.	Kab. Agam	418.752.290.000
3.	Kab. Kepulauan Mentawai	276.648.811.000
4.	Kab. Padang Pariaman	417.424.879.000
5.	Kab. Pasaman	318.683.509.000
6.	Kab. Pesisir Selatan	435.547.850.000

7. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
7.	Kab. Sijunjung	279.405.725.000
8.	Kab. Solok	368.844.815.000
9.	Kab. Tanah Datar	379.899.210.000
10.	Kota Bukit Tinggi	236.106.157.000
11.	Kota Padang Panjang	194.866.985.000
12.	Kota Padang	628.472.618.000
13.	Kota Payakumbuh	237.487.541.000
14.	Kota Sawahlunto	190.325.971.000
15.	Kota Solok	205.832.370.000
16.	Kota Pariaman	222.473.796.000
17.	Kab. Pasaman Barat	323.123.275.000
18.	Kab. Dharmasraya	249.595.284.000
19.	Kab. Solok Selatan	218.773.730.000
<b>IV.</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>171.850.958.000</b>
1.	Kab. Bengkalis	-
2.	Kab. Indragiri Hilir	399.637.979.000
3.	Kab. Indragiri Hulu	269.231.826.000
4.	Kab. Kampar	217.218.055.000
5.	Kab. Kuantan Singingi	273.037.374.000
6.	Kab. Pelalawan	215.631.126.000
7.	Kab. Rokan Hilir	-
8.	Kab. Rokan Hulu	239.214.656.000

9. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
9.	Kab. Siak	-
10.	Kota Dumai	113.529.596.000
11.	Kota Pekanbaru	340.970.891.000
<b>V.</b>	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>403.132.484.000</b>
1.	Kab. Bintan	161.217.104.000
2.	Kab. Natuna	90.283.632.000
3.	Kab. Karimun	183.935.505.000
4.	Kota Batam	279.657.186.000
5.	Kota Tanjung Pinang	229.298.175.000
6.	Kab. Lingga	178.512.366.000
7.	Kab. Kepulauan Anambas	33.015.570.000
<b>VI.</b>	<b>Provinsi Jambi</b>	<b>473.505.879.000</b>
1.	Kab. Batanghari	277.639.964.000
2.	Kab. Bungo	311.260.103.000
3.	Kab. Kerinci	334.053.902.000
4.	Kab. Merangin	346.136.052.000
5.	Kab. Muaro Jambi	292.369.128.000
6.	Kab. Sarolangun	273.448.633.000
7.	Kab. Tanjung Jabung Barat	202.709.096.000
8.	Kab. Tanjung Jabung Timur	218.717.904.000
9.	Kab. Tebo	281.387.116.000
10.	Kota Jambi	370.765.008.000
11.	Kota Sungai Penuh	58.482.239.000

**VII. Provinsi ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
<b>VII.</b>	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	507.355.883.000
1.	Kab. Lahat	355.790.413.000
2.	Kab. Musi Banyuasin	86.730.976.000
3.	Kab. Musi Rawas	388.990.904.000
4.	Kab. Muara Enim	399.021.321.000
5.	Kab. Ogan Komering Ilir	533.734.399.000
6.	Kab. Ogan Komering Ulu	304.457.643.000
7.	Kota Palembang	689.108.622.000
8.	Kota Pagar Alam	174.702.710.000
9.	Kota Lubuk Linggau	207.016.530.000
10.	Kota Prabumulih	187.553.335.000
11.	Kab. Banyuasin	441.349.776.000
12.	Kab. Ogan Ilir	282.733.012.000
13.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	361.075.567.000
14.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	253.291.226.000
15.	Kab. Empat Lawang	190.021.435.000
<b>VIII.</b>	<b>Provinsi Bangka Belitung</b>	407.994.844.000
1.	Kab. Bangka	278.338.813.000
2.	Kab. Belitung	242.771.071.000
3.	Kota Pangkal Pinang	234.862.401.000
4.	Kab. Bangka Selatan	219.706.903.000
5.	Kab. Bangka Tengah	196.780.649.000

6. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
6.	Kab. Bangka Barat	219.252.201.000
7.	Kab. Belitung Timur	218.123.874.000
<b>IX. Provinsi Bengkulu</b>		
1.	Kab. Bengkulu Selatan	272.434.666.000
2.	Kab. Bengkulu Utara	306.069.861.000
3.	Kab. Rejang Lebong	321.216.933.000
4.	Kota Bengkulu	340.287.159.000
5.	Kab. Kaur	204.909.166.000
6.	Kab. Seluma	247.378.848.000
7.	Kab. Mukomuko	234.105.397.000
8.	Kab. Lebong	207.907.459.000
9.	Kab. Kepahiang	215.415.025.000
10.	Kab. Bengkulu Tengah	79.376.104.000
<b>X. Provinsi Lampung</b>		
1.	Kab. Lampung Barat	335.364.166.000
2.	Kab. Lampung Selatan	444.670.385.000
3.	Kab. Lampung Tengah	669.111.784.000
4.	Kab. Lampung Utara	454.517.555.000
5.	Kab. Lampung Timur	537.536.893.000
6.	Kab. Tanggamus	567.317.219.000
7.	Kab. Tulang Bawang	464.051.063.000
8.	Kab. Way Kanan	327.277.673.000

9. Kota ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
9.	Kota Bandar Lampung	528.629.513.000
10.	Kota Metro	227.345.552.000
11.	Kab. Pesawaran	237.172.397.000
<b>XI.</b>	<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	-
<b>XII.</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	977.237.624.000
1.	Kab. Bandung	1.080.215.507.000
2.	Kab. Bekasi	618.237.958.000
3.	Kab. Bogor	1.111.979.562.000
4.	Kab. Ciamis	858.175.531.000
5.	Kab. Cianjur	840.775.052.000
6.	Kab. Cirebon	828.679.303.000
7.	Kab. Garut	1.012.043.617.000
8.	Kab. Indramayu	706.774.342.000
9.	Kab. Karawang	722.098.972.000
10.	Kab. Kuningan	638.787.537.000
11.	Kab. Majalengka	642.722.208.000
12.	Kab. Purwakarta	454.475.242.000
13.	Kab. Subang	666.926.184.000
14.	Kab. Sukabumi	855.787.030.000
15.	Kab. Sumedang	629.006.913.000
16.	Kab. Tasikmalaya	801.713.443.000
17.	Kota Bandung	989.233.620.000

18. Kota ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
18.	Kota Bekasi	630.392.977.000
19.	Kota Bogor	439.246.348.000
20.	Kota Cirebon	358.964.474.000
21.	Kota Depok	456.936.537.000
22.	Kota Sukabumi	287.525.695.000
23.	Kota Cimahi	339.000.335.000
24.	Kota Tasikmalaya	418.873.690.000
25.	Kota Banjar	209.610.505.000
26.	Kab. Bandung Barat	566.578.129.000
<b>XIII. Provinsi Banten</b>		
1.	Kab. Lebak	576.180.524.000
2.	Kab. Pandeglang	618.789.548.000
3.	Kab. Serang	582.544.636.000
4.	Kab. Tangerang	855.219.787.000
5.	Kota Cilegon	295.333.787.000
6.	Kota Tangerang	496.381.735.000
7.	Kota Serang	151.741.953.000
<b>XIV. Provinsi Jawa Tengah</b>		
1.	Kab. Banjarnegara	504.757.075.000
2.	Kab. Banyumas	735.150.422.000
3.	Kab. Batang	416.406.338.000
4.	Kab. Blora	487.316.394.000

5. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

<b>NO.</b>	<b>DAERAH</b>	<b>JUMLAH</b>
5.	Kab. Boyolali	586.021.039.000
6.	Kab. Brebes	716.589.942.000
7.	Kab. Cilacap	782.143.772.000
8.	Kab. Demak	488.814.489.000
9.	Kab. Grobogan	614.891.166.000
10.	Kab. Jepara	522.061.147.000
11.	Kab. Karanganyar	517.670.406.000
12.	Kab. Kebumen	638.804.310.000
13.	Kab. Kendal	512.809.060.000
14.	Kab. Klaten	726.192.262.000
15.	Kab. Kudus	471.869.492.000
16.	Kab. Magelang	596.437.825.000
17.	Kab. Pati	621.169.150.000
18.	Kab. Pekalongan	475.248.442.000
19.	Kab. Pemasang	609.478.066.000
20.	Kab. Purbalingga	462.101.482.000
21.	Kab. Purworejo	526.622.715.000
22.	Kab. Rembang	407.158.671.000
23.	Kab. Semarang	508.704.917.000
24.	Kab. Sragen	551.913.436.000
25.	Kab. Sukoharjo	509.725.076.000
26.	Kab. Tegal	624.981.282.000
27.	Kab. Temanggung	430.269.307.000

28. Kab. ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

<b>NO.</b>	<b>DAERAH</b>	<b>JUMLAH</b>
28.	Kab. Wonogiri	614.599.465.000
29.	Kab. Wonosobo	431.735.727.000
30.	Kota Magelang	256.728.827.000
31.	Kota Pekalongan	265.360.831.000
32.	Kota Salatiga	236.691.342.000
33.	Kota Semarang	687.629.207.000
34.	Kota Surakarta	435.470.810.000
35.	Kota Tegal	241.785.257.000
<b>XV. Provinsi DI Yogyakarta</b>		
1.	Kab. Bantul	568.502.143.000
2.	Kab. Gunung Kidul	508.212.308.000
3.	Kab. Kulon Progo	413.081.642.000
4.	Kab. Sleman	587.857.778.000
5.	Kota Yogyakarta	414.345.330.000
<b>XVI. Provinsi Jawa Timur</b>		
1.	Kab. Bangkalan	478.768.360.000
2.	Kab. Banyuwangi	766.830.353.000
3.	Kab. Blitar	629.881.991.000
4.	Kab. Bojonegoro	596.430.263.000
5.	Kab. Bondowoso	455.450.603.000
6.	Kab. Gresik	511.324.320.000
7.	Kab. Jember	940.397.110.000

8. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

<b>NO.</b>	<b>DAERAH</b>	<b>JUMLAH</b>
8.	Kab. Jombang	601.450.366.000
9.	Kab. Kediri	701.502.292.000
10.	Kab. Lamongan	581.718.829.000
11.	Kab. Lumajang	534.208.130.000
12.	Kab. Madiun	463.553.758.000
13.	Kab. Magetan	489.555.386.000
14.	Kab. Malang	959.098.690.000
15.	Kab. Mojokerto	502.176.671.000
16.	Kab. Nganjuk	590.834.933.000
17.	Kab. Ngawi	555.625.375.000
18.	Kab. Pacitan	429.136.640.000
19.	Kab. Pamekasan	458.239.639.000
20.	Kab. Pasuruan	606.162.820.000
21.	Kab. Ponorogo	550.746.051.000
22.	Kab. Probolinggo	537.641.362.000
23.	Kab. Sampang	428.946.475.000
24.	Kab. Sidoarjo	666.155.936.000
25.	Kab. Situbondo	433.443.480.000
26.	Kab. Sumenep	565.851.196.000
27.	Kab. Trenggalek	465.947.589.000
28.	Kab. Tuban	520.019.541.000
29.	Kab. Tulungagung	625.040.351.000

30. Kota ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

<b>NO.</b>	<b>DAERAH</b>	<b>JUMLAH</b>
30.	Kota Blitar	225.699.721.000
31.	Kota Kediri	408.246.662.000
32.	Kota Madiun	272.305.980.000
33.	Kota Malang	471.739.208.000
34.	Kota Mojokerto	238.044.910.000
35.	Kota Pasuruan	230.764.737.000
36.	Kota Probolinggo	259.533.136.000
37.	Kota Surabaya	765.885.571.000
38.	Kota Batu	218.135.356.000
<b>XVII.</b>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>744.834.145.000</b>
1.	Kab. Bengkayang	288.980.714.000
2.	Kab. Landak	346.879.764.000
3.	Kab. Kapuas Hulu	525.510.771.000
4.	Kab. Ketapang	591.873.083.000
5.	Kab. Pontianak	185.529.469.000
6.	Kab. Sambas	447.329.503.000
7.	Kab. Sanggau	441.901.635.000
8.	Kab. Sintang	486.869.592.000
9.	Kota Pontianak	404.239.748.000
10.	Kota Singkawang	262.349.304.000
11.	Kab. Sekadau	248.974.922.000
12.	Kab. Melawi	290.637.576.000

13. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
13.	Kab. Kayong Utara	211.792.119.000
14.	Kab. Kubu Raya	375.538.530.000
<b>XVIII. Provinsi Kalimantan Tengah</b>		
1.	Kab. Barito Selatan	331.540.119.000
2.	Kab. Barito Utara	307.770.495.000
3.	Kab. Kapuas	494.403.098.000
4.	Kab. Kotawaringin Barat	368.740.904.000
5.	Kab. Kotawaringin Timur	457.814.163.000
6.	Kota Palangkaraya	334.308.134.000
7.	Kab. Barito Timur	266.801.113.000
8.	Kab. Murung Raya	384.341.705.000
9.	Kab. Pulang Pisau	301.056.041.000
10.	Kab. Gunung Mas	305.705.127.000
11.	Kab. Lamandau	255.341.034.000
12.	Kab. Sukamara	255.056.095.000
13.	Kab. Katingan	386.742.228.000
14.	Kab. Seruyan	345.001.035.000
<b>XIX. Provinsi Kalimantan Selatan</b>		
1.	Kab. Banjar	378.141.321.000
2.	Kab. Barito Kuala	302.974.986.000
3.	Kab. Hulu Sungai Selatan	294.246.568.000

4. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
4.	Kab. Hulu Sungai Tengah	290.964.409.000
5.	Kab. Hulu Sungai Utara	248.185.315.000
6.	Kab. Kotabaru	376.062.655.000
7.	Kab. Tabalong	253.993.909.000
8.	Kab. Tanah Laut	292.068.725.000
9.	Kab. Tapin	256.779.334.000
10.	Kota Banjarbaru	218.325.020.000
11.	Kota Banjarmasin	403.882.411.000
12.	Kab. Balangan	184.188.485.000
13.	Kab. Tanah Bumbu	250.904.147.000
<b>XX.</b>	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	17.867.202.000
1.	Kab. Berau	254.356.933.000
2.	Kab. Bulungan	175.292.201.000
3.	Kab. Kutai Kartanegara	-
4.	Kab. Kutai Barat	339.894.940.000
5.	Kab. Kutai Timur	184.710.556.000
6.	Kab. Malinau	400.951.344.000
7.	Kab. Nunukan	124.384.512.000
8.	Kab. Paser	126.665.267.000
9.	Kota Balikpapan	176.848.083.000
10.	Kota Bontang	16.421.023.000
11.	Kota Samarinda	268.443.152.000

12. Kota ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
12.	Kota Tarakan	45.605.127.000
13.	Kab. Penajam Paser Utara	22.709.263.000
14.	Kab. Tana Tidung	24.331.111.000
<b>XXI.</b>	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>558.634.931.000</b>
1.	Kab. Bolaang Mongondow	250.171.332.000
2.	Kab. Minahasa	372.083.213.000
3.	Kab. Sangihe	280.697.778.000
4.	Kota Bitung	271.223.725.000
5.	Kota Manado	420.752.563.000
6.	Kab. Kepulauan Talaud	255.090.500.000
7.	Kab. Minahasa Selatan	279.551.364.000
8.	Kota Tomohon	204.691.553.000
9.	Kab. Minahasa Utara	256.513.575.000
10.	Kota Kotamobagu	192.532.853.000
11.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	196.136.283.000
12.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	202.512.657.000
13.	Kab. Minahasa Tenggara	205.591.521.000
14.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	49.625.950.000
15.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	55.386.453.000
<b>XXII.</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>388.325.256.000</b>
1.	Kab. Boalemo	205.842.052.000
2.	Kab. Gorontalo	344.628.680.000

3. Kota ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
3.	Kota Gorontalo	261.090.002.000
4.	Kab. Pohuwato	240.863.606.000
5.	Kab. Bone Bolango	230.411.999.000
6.	Kab. Gorontalo Utara	173.232.161.000
<b>XXIII.</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>629.397.186.000</b>
1.	Kab. Banggai	437.501.793.000
2.	Kab. Banggai Kepulauan	255.283.704.000
3.	Kab. Buol	258.595.688.000
4.	Kab. Toli-Toli	307.431.914.000
5.	Kab. Donggala	288.617.918.000
6.	Kab. Morowali	368.918.872.000
7.	Kab. Poso	379.547.127.000
8.	Kota Palu	354.620.326.000
9.	Kab. Parigi Moutong	365.471.657.000
10.	Kab. Tojo Una Una	263.960.632.000
11.	Kab. Sigi	215.939.122.000
<b>XXIV.</b>	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>663.422.394.000</b>
1.	Kab. Bantaeng	227.500.507.000
2.	Kab. Barru	252.533.641.000
3.	Kab. Bone	531.911.941.000
4.	Kab. Bulukumba	370.482.061.000
5.	Kab. Enrekang	263.559.594.000

6. Kab. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
6.	Kab. Gowa	419.301.035.000
7.	Kab. Jenepono	302.307.231.000
8.	Kab. Luwu	338.393.478.000
9.	Kab. Luwu Utara	325.495.735.000
10.	Kab. Maros	316.391.024.000
11.	Kab. Pangkajene Kepulauan	332.583.364.000
12.	Kab. Pinrang	346.659.515.000
13.	Kab. Kepulauan Selayar	252.361.321.000
14.	Kab. Sidenreng Rappang	306.786.701.000
15.	Kab. Sinjai	288.763.346.000
16.	Kab. Soppeng	320.703.916.000
17.	Kab. Takalar	292.181.834.000
18.	Kab. Tana Toraja	262.374.882.000
19.	Kab. Wajo	352.944.661.000
20.	Kota Pare-pare	237.297.753.000
21.	Kota Makassar	647.299.704.000
22.	Kota Palopo	244.343.643.000
23.	Kab. Luwu Timur	227.784.085.000
24.	Kab. Toraja Utara	139.828.395.000
<b>XXV.</b>	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>391.060.506.000</b>
1.	Kab. Majene	252.249.643.000
2.	Kab. Mamuju	361.952.352.000

3. Kab. ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
3.	Kab. Polewali Mandar	342.586.433.000
4.	Kab. Mamasa	227.701.872.000
5.	Kab. Mamuju Utara	192.506.834.000
<b>XXVI. Provinsi Sulawesi Tenggara</b>		
1.	Kab. Buton	330.359.350.000
2.	Kab. Konawe	400.075.812.000
3.	Kab. Kolaka	375.906.720.000
4.	Kab. Muna	396.946.601.000
5.	Kota Kendari	339.094.211.000
6.	Kota Bau-bau	261.581.336.000
7.	Kab. Konawe Selatan	321.251.389.000
8.	Kab. Bombana	229.576.164.000
9.	Kab. Wakatobi	203.249.058.000
10.	Kab. Kolaka Utara	234.069.677.000
11.	Kab. Konawe Utara	250.710.832.000
12.	Kab. Buton Utara	199.566.735.000
<b>XXVII. Provinsi Bali</b>		
1.	Kab. Badung	280.987.801.000
2.	Kab. Bangli	276.000.474.000
3.	Kab. Buleleng	506.292.801.000
4.	Kab. Gianyar	393.599.129.000
5.	Kab. Jembrana	306.361.821.000

6. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
6.	Kab. Karangasem	356.681.483.000
7.	Kab. Klungkung	278.553.027.000
8.	Kab. Tabanan	424.281.469.000
9.	Kota Denpasar	360.011.268.000
<b>XXVIII. Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>		
1.	Kab. Bima	440.300.935.000
2.	Kab. Dompu	300.006.855.000
3.	Kab. Lombok Barat	324.113.809.000
4.	Kab. Lombok Tengah	515.661.574.000
5.	Kab. Lombok Timur	627.028.938.000
6.	Kab. Sumbawa	424.698.823.000
7.	Kota Mataram	314.246.390.000
8.	Kota Bima	234.244.080.000
9.	Kab. Sumbawa Barat	173.465.929.000
10.	Kab. Lombok Utara	162.614.416.000
<b>XXIX. Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>		
1.	Kab. Alor	295.934.118.000
2.	Kab. Belu	384.884.189.000
3.	Kab. Ende	322.456.127.000
4.	Kab. Flores Timur	324.831.413.000
5.	Kab. Kupang	412.501.861.000
6.	Kab. Lembata	223.441.639.000

7. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
7.	Kab. Manggarai	232.277.815.000
8.	Kab. Ngada	240.088.470.000
9.	Kab. Sikka	311.871.977.000
10.	Kab. Sumba Barat	221.029.807.000
11.	Kab. Sumba Timur	337.421.147.000
12.	Kab. Timor Tengah Selatan	395.744.261.000
13.	Kab. Timor Tengah Utara	289.194.251.000
14.	Kota Kupang	329.002.227.000
15.	Kab. Rote Ndao	207.112.494.000
16.	Kab. Manggarai Barat	247.340.948.000
17.	Kab. Nagekeo	211.190.380.000
18.	Kab. Sumba Barat Daya	223.982.448.000
19.	Kab. Sumba Tengah	171.225.602.000
20.	Kab. Manggarai Timur	171.322.816.000
<b>XXX.</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>578.163.797.000</b>
1.	Kab. Maluku Tenggara Barat	243.889.299.000
2.	Kab. Maluku Tengah	437.596.185.000
3.	Kab. Maluku Tenggara	221.148.784.000
4.	Kab. Buru	196.267.473.000
5.	Kota Ambon	354.892.120.000
6.	Kab. Seram Bagian Barat	281.080.400.000
7.	Kab. Seram Bagian Timur	219.402.316.000

8. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
8.	Kab. Kepulauan Aru	265.074.957.000
9.	Kab. Maluku Barat Daya	145.567.203.000
10.	Kota Tual	55.066.597.000
11.	Kab. Buru Selatan	93.866.064.000
<b>XXXI.</b>	<b>Provinsi Maluku Utara</b>	<b>458.511.662.000</b>
1.	Kab. Halmahera Tengah	213.499.744.000
2.	Kab. Halmahera Barat	216.545.400.000
3.	Kota Ternate	262.094.346.000
4.	Kab. Halmahera Timur	195.145.304.000
5.	Kota Tidore Kepulauan	220.205.144.000
6.	Kab. Kepulauan Sula	234.455.779.000
7.	Kab. Halmahera Selatan	301.027.615.000
8.	Kab. Halmahera Utara	275.712.386.000
<b>XXXII.</b>	<b>Provinsi Papua</b>	<b>1.058.227.764.000</b>
1.	Kab. Biak Numfor	315.269.819.000
2.	Kab. Jayapura	373.049.035.000
3.	Kab. Jayawijaya	161.558.644.000
4.	Kab. Merauke	701.998.182.000
5.	Kab. Mimika	193.779.226.000
6.	Kab. Nabire	287.200.638.000
7.	Kab. Paniai	374.570.638.000
8.	Kab. Puncak Jaya	243.307.549.000

9. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
9.	Kab. Kepulauan Yapen	257.992.734.000
10.	Kota Jayapura	335.198.261.000
11.	Kab. Sarmi	397.026.594.000
12.	Kab. Keerom	285.334.237.000
13.	Kab. Yahukimo	398.047.147.000
14.	Kab. Pegunungan Bintang	446.711.879.000
15.	Kab. Tolikara	314.937.188.000
16.	Kab. Boven Digoel	480.506.050.000
17.	Kab. Mappi	439.550.999.000
18.	Kab. Asmat	534.206.644.000
19.	Kab. Waropen	310.978.549.000
20.	Kab. Supiori	194.427.850.000
21.	Kab. Mamberamo Raya	390.782.231.000
22.	Kab. Mamberamo Tengah	53.014.445.000
23.	Kab. Yalimo	86.560.029.000
24.	Kab. Lanny Jaya	82.394.212.000
25.	Kab. Nduga	74.588.205.000
26.	Kab. Dogiyai	135.249.300.000
27.	Kab. Puncak	198.296.510.000
<b>XXXIII.</b>	<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>595.755.729.000</b>
1.	Kab. Sorong	327.404.606.000
2.	Kab. Manokwari	395.180.806.000

3. Kab. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	DAERAH	JUMLAH
3.	Kab. Fak Fak	361.805.522.000
4.	Kota Sorong	239.509.590.000
5.	Kab. Sorong Selatan	267.500.339.000
6.	Kab. Raja Ampat	314.043.412.000
7.	Kab. Teluk Bintuni	343.382.321.000
8.	Kab. Teluk Wondama	213.946.833.000
9.	Kab. Kaimana	353.360.551.000
<b>Total Provinsi</b>		<b>18.641.410.000.000</b>
<b>Total Kabupaten / Kota</b>		<b>167.772.690.000.000</b>
<b>Total Nasional</b>		<b>186.414.100.000.000</b>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso